

# EVALUASI UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI KORBAN BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH

Zahrul Rizki  
NPP. 29.1278

*Asdaf Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh  
Program Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

## Abstract

**Problem Statement/Background (GAP):** The emergence of the Covid-19 virus has become a new problem for the world. The spike in the Covid-19 virus is fairly fast and high in all affected areas, one of which is Aceh. The pandemic has had a fairly severe impact on all aspects of life, one of which is the economic aspect. In dealing with problems that arise due to the pandemic, the government has made various efforts, but does not deny that an evaluation of its implementation is still needed.

**Purpose:** The purpose of this study was to find out how big the economic impact is due to the Covid-19 pandemic in North Aceh district, as well as to find out what factors are driving, inhibiting and evaluating the government's efforts towards economic recovery for victims of the Covid-19 pandemic through the Social Service in the District. North Aceh Aceh Province.. **Methods:** The research design used is a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. While the data analysis techniques used are data reduction, data display, and drawing conclusions/verification. **Result:** The results of this study it shows that the Social Service has made quite good efforts towards economic recovery for victims of the Covid-19 pandemic disaster in North Aceh Regency. This can be seen and measured from several things, namely, Effectiveness, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy, so that it can evaluate the efforts of the government. In the implementation of the Social Service's economic recovery efforts, there are several driving factors including the support from regional heads, cross-sectoral collaboration between government agencies and budget availability, while the inhibiting factors include the community's lack of complete personal data, there are still many people who do not understand the requirements. to get social assistance. Meanwhile, efforts are being made to overcome these problems, among others, by optimizing the provision of cash and non-cash social assistance and collaborating with all relevant stakeholders for the prevention of Covid-19.

**Keywords:** Evaluation, Social Service, Economic recovery for victims of the Covid-19 pandemic

## Abstrak

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Munculnya virus Covid-19 menjadi masalah baru bagi dunia. Lonjakan virus Covid-19 terbilang sangat cepat dan tinggi di semua wilayah terjangkau, salah satunya Aceh. Pandemi memberikan dampak yang cukup berat bagi semua aspek kehidupan salah satunya aspek ekonomi. Dalam menangani permasalahan yang muncul akibat pandemi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, namun tidak menampik jika masih diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaannya. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak perekonomian akibat pandemic Covid-19 di kabupaten Aceh Utara, serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong, penghambat dan mengevaluasi upaya pemerintah terhadap pemulihan ekonomi korban bencana pandemic Covid-19 melalui Dinas Sosial di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh **Metode:** Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil:** Dinas Sosial telah mengupayakan dengan cukup baik terhadap pemulihan ekonomi korban bencana pandemic Covid-19 di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dapat dilihat dan diukur dari beberapa hal yaitu, Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan, sehingga dapat mengevaluasi upaya dari pemerintah. Dalam pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi Dinas Sosial terdapat beberapa faktor pendorong diantaranya adalah adanya dukungan dari kepala daerah, kerjasama antar lintas sektor antar instansi pemerintah serta ketersediaan anggaran, sedangkan Faktor Penghambat diantaranya masyarakat masih kurang lengkap akan data pribadi, masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan mengoptimalkan pemberian bantuan social tunai maupun non tunai dan bekerja sama dengan seluruh *stake holder* terkait untuk pencegahan Covid-19. **Kata Kunci :** Evaluasi, Dinas Sosial, Pemulihan ekonomi korban pandemic Covid-19

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tepat pada tanggal 31 Desember 2019 dunia dikejutkan dari laporan WHO China Country Office yang melaporkan bahwasanya terdapat kasus pneumonia yang etiologinya tak diketahui di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. berikutnya terhadap tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tak diketahui etiologinya tadi sebagai jenis baru yang dinamakan Corona Virus Disease, Covid-19. (diskes.baliprov.go.id). Virus ini dengan cepat menyebar dalam waktu yang singkat dan bahkan hingga keberbagai penjuru dunia. Berdasarkan bukti ilmiah, virus Covid-19 ini dapat menular melalui kontak erat dan juga droplet seperti berpegangan tangan, berciuman ataupun dengan saling bernapas dengan jarak yang dekat, itulah cara penularan yang terjadi dari manusia ke manusia.

Kabupaten Aceh Utara termasuk wilayah padat penduduk, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk maka perekonomian pun semakin sulit ditambah terhadap saat masa pandemi Covid-19.

#### **a. Evaluasi**

Menurut Dunn (2003:608) evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi menyangkut dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Suharto (2012:119) menyatakan bahwa evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana aktivitas ataupun program. Evaluasi dibagi menjadi dua tipe yaitu *on going evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *ex-post evaluation* atau evaluasi akhir.

#### **b. Upaya**

Dalam Kamus Etimologi kata Upaya berarti mendekati, didekati atau pendekatan guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan di buku lain menjelaskan bahwa konsep dari upaya merupakan suatu usaha, sebab ataupun keinginan guna mencapai suatu tujuan, memecahkan suatu masalah, serta mencari solusinya. Definisi Upaya Menurut Kelompok Penyusun Depdiknas (2008:1787), “upaya merupakan usaha, sebab ataupun keinginan guna mencapai suatu tujuan, memecahkan suatu permasalahan, mencari solusinya, serta sebagainya”. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya upaya merupakan suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.

#### **c. Indikator Penanganan Pandemi Covid-19**

Menurut Anwar dkk. (2020:236) dalam penanganan Covid-19, ada beberapa program penanganan yang dapat dikembangkan oleh fasilitator diantaranya :

1. Materi  
salah satu aspek yang wajib tersedia dalam program pemberdayaan warga merupakan materi yang akan diberikan. Materi yang dimaksud berisi intisari pembelajaran yang disajikan secara sederhana serta mudah dimengerti, hingga proses transformasinya dapat berlangsung efektif.
2. Metode  
dalam hal ini menyangkut tindakan strategis serta teknis yang sengaja dipilih supaya warga mudah mengikuti paket-paket program pemberdayaan yang dikembangkan. Termasuk tindakan melibatkan *stakeholders* seoptimal mungkin.

#### **d. Pemulihan Ekonomi**

Pemulihan merupakan serangkaian aktivitas yang ditujukan guna memulihkan keadaan warga serta lingkungan yang terkena bencana alam/non alam dengan mengembalikan fungsi lembaga, prasarana serta sarana melalui pelaksanaan aktivitas rehabilitasi (UU No 24 Th. 2007). Proses mengembalikan kondisi ekonomi warga serta ataupun negara yang terkena akibat dari bencana pandemi Covid-19 di Indonesia, melalui program ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun program itu seperti Program Ekonomi Nasional (PEN) yang dimana tersebut

aktivitas pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan guna memulihkan kondisi ekonomi dan merupakan dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dan guna menghadapi ancaman perekonomian (PP No.23 Th. 2020). Menurut menko perekonomian ada tiga hal yang perlu diperhatikan guna dapat *exit strategy*. Yaitu diperlukan *timeboxing* supaya berhasil di dua aspek, hingga perekonomian pulih dan aman dari virus. Yang pertama pencegahan penyebaran virus dengan melalui perluasan kapasitas treatment serta testing, vaksin, serta menemukan obat. lalu yang kedua penyelamatan perekonomian global, dengan dukungan bagi warga dan dunia usaha yang terdampak, percepatan pemulihan ekonomi, serta pembukaan ekonomi terhadap saat virus sudah mereda (Dr. Airlangga).

#### **e. Dampak Covid-19**

Pada Th. 2020 lalu, dunia dihebohkan ketika ditemukan virus baru (SARS-CoV-2) serta penyakit ini dijuluki *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Virus itu diketahui berasal dari Wuhan, China. serta ditemukan virus ini terhadap akhir Desember 2019, dari data epidemiologi awalnya menunjukkan 66% pasien terkait dengan pasar makanan laut ataupun pasar hidup di Wuhan, Provinsi Hobei, China. Setelah diuji dari pasien yang diisolasi, ditemukan adanya yang terinfeksi virus Corona, jenis baru betacoronavirus, bernama *2019 novel Coronavirus* (2019-nCoV). Penularan virus ini terhadap awalnya tak bisa ditentukan apakah bisa menular dari orang ke orang, jumlah kasus terus meningkat pesat dari waktu ke waktu. Selain itu, ada pula kasus 15 tenaga medis yang terinfeksi dari pasien positif, serta akhirnya dipastikan bahwasanya penularan pneumonia ini dapat menular dari orang ke orang.

Wabah ini telah diklasifikasikan sebagai pandemi oleh WHO (World Health Organization) ataupun Badan Kesehatan Dunia sebab peningkatan infeksi terhadap manusia telah menyebar luas di semua dunia. WHO (World Health Organization) sendiri secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi terhadap 9 Maret 2020 (Qiu, Rutherford, Mao, & Chu).

#### **f. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia**

Pandemi Covid-19 bukanlah bencana global yang menyerang kesehatan penduduk dunia saja, tetapi pula pandemi Covid-19 adalah masalah bagi perekonomian global. Dalam tantangan ekonomi ini, tak bisa dipungkiri bahwasanya pandemi Covid-19 pula akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Indonesia mengalami krisis yang sangat serius di bidang ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi terhadap triwulan I-2020 sebesar 2,97%. Perekonomian di Indonesia mulai goyah sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia serta dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Indonesia. Terninjau dari laporan BI (Bank Indonesia) bahwasanya perekonomian Indonesia mengalami kontraksi (penurunan) terhadap triwulan II-2020 yaitu negatif 5,32%. Menurunnya perekonomian Indonesia disebabkan oleh melemahnya perekonomian global (Onny Widjanarko, 2020).

Hanoatubun dalam Edu PsyCouns Journal (2020) menggambarkan dampak dan ancaman Covid-19 pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia, diantaranya :

1. Banyak pekerja yang dirumahkan bahkan PHK. Jumlahnya mencapai 1,5 juta dengan persentase 90% dirumahkan dan 10% lainnya terkena PHK. Dari jumlah ini terbagi diantaranya 1,24 juta pekerja formal serta 265 ribu pekerja formal.
2. Berdampak pada sektor impor. Menurunnya angka impor sebanyak 3,7% *year-to-date (ytd)* pada triwulan I 2020.
3. Terjadinya inflasi yang tidak bisa dihindari. Peningkatan harga pada emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan mencapai 2,96% *year-to-year (yty)* sejak Maret 2020.
4. *Prompt Manufacturing Index* (PMI) yaitu indikator yang menyediakan gambaran umum mengenai kondisi Sektor Industri Pengolahan baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan. Terjadinya penurunan pada PMI hingga 45,3 pada Maret 2020. Di Agustus 2019 angka PMI Indonesia berada di angka 49.
5. Terdampaknya sektor penerbangan. Sebanyak 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional dibatalkan. Akibatnya terjadi penurunan pendapatan mencapai Rp. 207 Miliar dimana Rp 4,8 Miliar diantaranya berasal dari penerbangan dari dan menuju Cina.
6. Turunnya kunjungan wisatawan (turis) hingga 6.800 per hari, terutama turis dari Cina.
7. Terimbasnya industri perhotelan. Sebanyak 6 ribu hotel mengalami okupansi sebanyak 50%.

**g. Undang-Undang Dasar 1945**

Pelayanan pada kesehatan adalah salah satu tanggung jawab pemerintah kepada semua warga yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang – undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir serta batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang dimaksud di atas ialah dimana dalam undang undang telah diatur jelas setiap orang memiliki hak guna mendapatkan jaminan kesehatan, semua warga negara akan dilindungi dari sisi kesehatan meninjau sekarang Indonesia sedang mengalami musibah bencana Covid-19 maka dari tersebut negara memiliki peran serta tantangan lebih terkait hal ini.

**h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Th. 2020 mengenai Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam Rangka mendukung kebijakan keuangan negara guna Penanganan pandemi *corona virus disease 2019* (covid- 19). Dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yaitu :

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang berikutnya disebut Program PEN merupakan serangkaian tindakan pemulihan perekonomian nasional yang adalah bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan virus corona (COVID19) dan/atau konfrontasi dengan

ancaman pada perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi negara.

**i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Th. 2020 mengenai Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Aceh perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Aceh (APBA) guna antisipasi serta penanganan akibat penularan COVID-19.

**j. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 mengenai Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako serta Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)**

Sebagaimana diketahui bahwasanya guna melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan guna Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi warga yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu memberikan bantuan sosial sembako serta bantuan sosial tunai. Adapun bentuk penyaluran pula lewat program lainnya seperti adanya program PKH Program Keluarga Harapan dari kemensos serta ada pula beberapa program lainnya seperti JPS Jaring Pengaman Sosial serta program lainnya juga, yang bertujuan sama guna meningkatkan kesejahteraan ataupun mengurangi kemiskinan akan dari akibat pandemi Covid-19 terhadap saat ini.

**k. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020**

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 mengenai penetapan serta penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota se Aceh guna antisipasi serta penanganan akibat penularan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2020. Menurut peraturan di atas dimana diatur mengenai keuangan serta pemberian bantuan kepada daerah kabupaten/kota dalam penanganan Covid-19.

**l. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2020**

Peraturan bupati aceh utara No. 37 Th. 2020 mengenai perubahan atas peraturan bupati aceh utara No. 7 Th. 2020 mengenai pedoman teknis penggunaan dana gampong dalam kabupaten aceh utara Th. 2020. menurut terhadap pasal 8A menjelaskan bahwasanya penanganan akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 bisa berupa BLT, PKH maupun bantuan sosial lainnya.

**1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ditetapkannya Covid-19 menjadi pandemi global berdampak pula pada berbagai aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 dengan cepat dapat melumpuhkan sektor-sektor penting salah satunya sektor ekonomi. Hal ini menjadi tugas baru bagi pemerintah untuk mencari upaya guna memulihkan perekonomian kabupaten/kota. Walaupun telah dilaksanakan upaya-upaya pemulihan perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian maupun metode penelitian. Penelitian Rahmadi dkk (2016) dengan judul Pengaruh Keterlibatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Terhadap Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie mendapatkan hasil program PNPM sudah berjalan dengan efektif sehingga perlahan masyarakat sudah mampu memulihkan keadaan dari bencana, pembangunan infrastruktur juga menjadi program penting karena dapat mengembalikan pergerakan masyarakat dengan bebas dan mudah. Penelitian Fadli (2021) tentang Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Umkm Di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Penelitian Putri, dkk (2020) yang berjudul Dampak Covid-19 pada Perekonomian Indonesia menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian diantaranya sulit mencari pekerjaan, banyak karyawan yang dirumahkan tanpa digaji, timbulnya kejahatan di beberapa daerah, dan negara mengalami kerugian besar. Berdasarkan Literatur Review oleh Yamali, dkk (2020) menjelaskan dampak yang disebabkan oleh pandemi di Indonesia diantaranya terjadinya PHK, PMI *Manufacturing* Indonesia, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi), dan terjadi kerugian pada sektor pariwisata yang menyebabkan terjadinya okupansi.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini meneliti evaluasi upaya pemerintah terhadap pemulihan ekonomi korban bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahmadi; Fadli; Putri, dkk; dan Yamali, dkk.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan seberapa besar dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian sehingga bisa meningkat atau menurun di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dalam melakukan pemulihan ekonomi terhadap korban pandemi Covid-19.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimana peneliti sebagai alat ataupun kuncinya. Teknologi pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi) dan hasil penelitian induksi serta kualitatif cuma terfokus terhadap satu masalah, bukan masalah umum.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi lapangan kepada 6 informan. Wawancara dilakukan melalui cara mewawancarai informan, teknik

*Purposive Sampling* dan teknik *Snowball Sampling*. Kedua teknik tersebut digunakan karena mempertimbangkan posisi dan jabatan yang sesuai dengan kriteria. Selain itu pertimbangan bahwa masing-masing informan pada unit instansi tersebut memiliki informasi yang tepat dan dapat melengkapi atau mengklarifikasi informasi yang disampaikan satu sama lain secara tidak langsung Analisis data menggunakan teknik analisis triangulasi data dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, dan visualisasi data.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kabupaten Aceh Utara**

Kabupaten Aceh Utara berada di bagian utara Provinsi Aceh yang secara geografis terletak antara 95°52' – 97°31' Bujur Timur dan 4°46' - 5°18' Lintang Utara.

Gambar 1. Peta Kabupaten Aceh Utara



Secara administrasi wilayah kabupaten Aceh Utara memiliki 27 kecamatan serta 852 gampong dengan jumlah wilayah keseluruhan kurang lebih 3.296,86 km. Penduduk di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020 berjumlah 572.961 jiwa dengan kepadatan penduduk 174 jiwa/km<sup>2</sup> sehingga kepadatannya dinyatakan padat.

#### **3.2. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Aceh**

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 47 SKPD. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah disahkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Th. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara.

#### **3.3. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara adalah salah satu lembaga teknis daerah yang di bentuk menurut ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Th. 2016 mengenai Pembentukan serta Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara mengenai Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara mengenai Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan sosial, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Seperti yang diketahui bersama bahwasanya Visi dari Pemerintah Aceh Utara yang merupakan visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu adalah “Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”. Dalam tindakan mewujudkan visi Bupati serta



Wakil Bupati itu maka dijabarkan lima misi yang mencakup semua sektor. Dari kelima misi Bupati serta Wakil Bupati Aceh Utara Th. 2017-2022 yang berkaitan dengan tugas serta fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara merupakan sebagai berikut: Misi : Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar Helsinki serta UUPA. Optimalisasi daerah, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur gampoeng, sekaligus mengembangkan potensi unggulan yang berorientasi terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Adapun misi dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara dimana peneliti mengambil pada Misi II : meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan social, rehabilitasi, pemberdayaan social dan jaminan kesejahteraan social bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Sedangkan tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara adalah terwujudnya masyarakat yang bermartabat dan berkejahteraan sosial.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan, sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara diperkuat dengan SDM yang beragam baik PNS maupun Non PNS. Jumlah PNS Keseluruhan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara per 20 Januari 2022 sebanyak 67 orang, terdiri dari 40 orang atau 60% PNS, 9 orang atau 13% Tenaga Bhakti, dan 18 orang atau 27% Tenaga Kontrak.

#### **3.4. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kota Tangerang**

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara guna pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19. Dari pemerintah pusat adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana pula bertujuan guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi dari akibat pandemic Covid-19. Yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 100 / HUK / 2020 mengenai Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako serta Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adanya program itu pula di turunkan hingga ke tingkat Provinsi serta Kabupaten terkhusus di Kabupaten Aceh Utara.

Kabupaten Aceh Utara telah mengupayakan untuk bantuan social baik dari program pusat yang menggunakan APBN yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga program daerah yang di gunakan dari APBD yang bertujuan untuk membantu memulihkan keadaan pasca pandemic dalam hal perekonomian, Pada pelaksanaan program ini sangat membutuhkan peran, partisipasi serta dukungan langsung dari berbagai pihak baik itu pihak pelaksana program, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat di daerah Kabupaten Aceh Utara.

Dalam mengevaluasi upaya dari pemerintah terhadap pemulihan ekonomi korban bencana pandemic Covid-19 ini peneliti menggunakan teori evaluasi menurut W.Dunn dengan menggunakan lima dimensi yang harus dipenuhi agar mengetahui

apakah upaya dari pemerintah sudah sesuai atau belum. Menurut W.Dunn mengevaluasi upaya dari pemerintah dapat dilihat dan diukur dari beberapa hal. Pertama Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

### **3.5. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian di Kabupaten Aceh Utara**

Dampak dari pandemic Covid-19 ini telah mempengaruhi perekonomian global, terutama di Kabupaten Aceh Utara. Seperti yang di ketahui di Indonesia sendiri terjadinya gelombang tsunami Covid-19 yaitu di akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2021. Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penyebarannya, pemerintah membuat peraturan terkait pembatasan gerak social untuk mencegah keramaian yang dapat memicu meningkatnya kasus persebaran Covid-19. Peraturan Bupati Aceh Utara No. 30 Th. 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Aceh Utara. Dari Peraturan Bupati Aceh Utara No. 30 Th. 2020, maka banyak pembatasan baik jarak maupun jumlah orang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan sekolah dan kampus juga di liburkan dan menerapkan pembelajaran jarak jauh (Daring), tidak hanya sekolah namun perkantoran juga memberlakukan hal yg sama dengan membagi jumlah pegawai yang aktif atau menerapkan piket. Dengan begitu pelaku usaha baik seperti ojek, supir bus, penjual makanan, tukang parkir dan lain sebagainya, mendapatkan hasil yang jauh berbeda dan itu sangat kurang bagi mereka. Tidak hanya itu, tetapi pemerintah juga melarang seluruh masyarakat untuk berkumpul hingga untuk belanja pun harus menggunakan system take away, dimana tidak boleh makan di tempat.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pembatasan gerak social dilakukan dengan baik dan dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah yang sudah dibuat, maka dari itu juga dapat diketahui bahwa tidak sedikit para pelaku usaha UMKM, Coffee shop dan Restoran yang harus tutup, dan juga banyak para pekerja seperti pelayan, pramusaji dan lain sebagainya yang harus di PHK.

#### **a. Struktural / Bangunan atau Benda (fisik)**

Dampak pandemic Covid-19 sangat meluas dan mencapai ke berbagai sector, maka dalam hal ini untuk mencegah penyebaran Virus tersebut perlu adanya strategi khusus dari pemerintah dan dimana salah satunya yaitu secara structural, Struktural mengandung arti berkaitan dengan struktur. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa di Aceh Utara memiliki Posko dan Satgas yang memantau dan berupaya untuk penanganan Covid-19.

#### **b. Non Struktural / Peraturan atau Kebijakan (Non Fisik)**

Pencegahan pandemic Covid-19 dari Non struktural yaitu diluar susunan yang harus dibangun, namun dengan adanya pernyataan atau peraturan yang membuat, membatasi atau menghapus suatu kebijakan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi Covid-19, dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah dapat mengontrol atau membatasi kasus persebaran positif Covid-19

### **3.6. Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh**

Faktor yang mempengaruhi perekonomian terdapat dua factor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.

#### **1. Faktor Penghambat**

- Adanya kebijakan PPKM
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan PPKM
- Ketakutan yang berlebihan pada masyarakat atas kelangkaan barang di masa pandemi Covid-19

#### **2. Faktor Pendukung**

- Adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional
- Munculnya lapangan kerja baru di era New Normal, seperti jasa penitipan barang, jasa pengantaran barang, serta jasa antar jemput
- Penjualan kuota internet, serta bahan baku sembako dan gas yang meningkat akibat kurangnya aktivitas di luar rumah

Sedangkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada factor penghambat dan pendukung, seperti tidak bisanya mencari rezeki pedagang makanan termasuk yang punya warung makan karena dengan pemberlakuan PPKM maka banyak hal yang dibatasi, dibalik itu semua ada juga sektor yang menguntungkan akibat pandemi yaitu para penjual masker bahkan yang memanfaatkan jualan online.

### **3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil dari penelitian ini sedikit banyak mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan penertiban bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional meskipun dalam pelaksanaannya tetap ditemui adanya faktor penghambat. Namun juga ditemukan adanya faktor pendukung yang sedikit banyak dapat mempermudah Satpol PP menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam menangani kendala terkait faktor penghambat yang ditemukan, Satpol PP dapat menangani faktor penghambat tersebut dengan berbagai upaya yang dilakukan dengan pelaksanaan yang sangat baik.

### **3.8. Upaya dari Pemerintah dalam Melakukan Pemulihan Ekonomi terhadap Korban Pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh**

Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam pemulihan ekonomi, pemerintah pusat mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 100 / HUK / 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dimana program ini juga bertujuan untuk salah satu upaya mendorong percepatan dalam pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai perpanjangan tangan dari Pemerinta Pusat juga berusaha untuk memulihkan ekonomi terutama untuk korban bencana pandemic Covid-19, Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara telah mengupayakan pemulihan ekonomi melalui program PEN tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya pemerintah terhadap pemulihan ekonomi korban bencana pandemic Covid-19 dengan pemberian Bantuan Jaminan Social dan sudah berjalan dengan baik, dimana pemerintah baik dari Pusat, Provinsi dan bahkan dari Kabupaten sendiri telah membuat program untuk bantuan social. Bantuan Jaminan Social diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan bagi korban yang terdampak dari Covid-19. Berikut data Bantuan Jaminan Social di Kabupaten Aceh Utara sepanjang 2020 hingga 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Data Bantuan Jaminan Sosial Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

No	BANSOS	JUMLAH	SUMBER	KETERANGAN
1	BANTUAN SEMBAKO	2.056 KK	APBK	COVID
2	BANTUAN SEMBAKO	5.324 KK	APBA	COVID
3	BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)	31.038 KK	APBN	COVID
4	BERAS PPKM – KPM PKH + BST	2.461 KK	APBN	COVID

  

No	BANSOS	JUMLAH	SUMBER	KETERANGAN
1	BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN - UEP PERORANGAN - UEP KELOMPOK	2.056 KK	APBK	REGULER
2	BANTUAN PKH	40.768 KK	APBN	REGULER
3	BANTUAN BPNT/BSP	57.241 KK	APBN	REGULER

(Sumber : Dinsos Kabupaten Aceh Utara, 2022)

Gambar 3. Data Bantuan Jaminan Sosial Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

No	BANSOS	JUMLAH	SUMBER	KETERANGAN
1	BANTUAN JARING PENGAMANAN SOSIAL (JPS)	3.278 KK	APBA	REGULER
2	BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) (JUNI)	31.038 KK	APBN	COVID
3	BANTUAN BPNT PPKM	18.923 KK	APBN	COVID

  

No	BANSOS	JUMLAH	SUMBER	KETERANGAN
1	BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN - UEP PERORANGAN - UEP KELOMPOK	252 KK 60 KELOMPOK	APBK	REGULER
2	PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN	140 KK	APBA	REGULER
3	PKH TAHAP 4	39.138 KK	APBN	REGULER
4	BANTUAN BPNT/BSP	55.301 KK	APBN	REGULER

(Sumber : Dinsos Kabupaten Aceh Utara, 2022)

a. Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan dalam pendataan serta pembagian Bansos sudah efektif, dimana berawal dari tingkat desa yaitu kepala desa yang mendata, hingga tim pelaksana administrasi yang akan mengecek langsung ke lokasi apakah yang mendapatkan bantuan benar keluarga miskin atau korban yang terdampak Covid-19, setelah itu baru di laporkan ke pihak Dinas Sosial untuk diproses.

b. Kecukupan

Peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara bahwasanya pembagian PKH atau program lain sudah dipilih untuk masyarakat yang benar benar memerlukan sesuai dengan programnya.

Setiap program Bantuan Jaminan Sosial berbeda beda, seperti bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin ada yang berkelompok dan ada yang perseorangan, namun itu tidak berbentuk tunai. Untuk yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), ada juga bantuan BPNT PPKM untuk yang terdampak dari PPKM pada masa pandemic. Karena itu pemerintah harus tepat dalam memilih sasaran untuk yang mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial.

c. Pemerataan

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dari desa juga tidak akan membiarkan adanya kesalahan dalam pembagian Bantuan Jaminan Sosial, dan akan di cek secara merata yang harus didapatkan sesuai dengan apa yang di data. Jadi tidak akan ada intervensi politik atau pemotongan dari pihak lainnya, dan untuk jumlahnya pasti sudah sesuai dari apa yang di siapkan oleh pemerintah.

d. Responsivitas

Hasil wawancara menjelaskan untuk mendapatkan bantuan social tidak asal terima dan memiliki kriteria serta persyaratan tersendiri sehingga pembagian sudah seperti atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang di dapatkan oleh masyarakat dari bantuan social juga Pemerintah pastinya sudah menghitung berapa yang seharusnya diterima oleh masyarakat untuk kelanjutan hidupnya serta memulihkan keadaan perekonomian pada masa pandemic hingga sampai penerimaan Bantuan Jaminan Social pada tahap berikutnya,

e. Ketepatan

Dari hasil wawancara bersama pihak Dinas Sosial yang memegang program dan pelaksana di Gampong (Desa) maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian bantuan social sudah secara terbuka dan merata sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Upaya dari pemerintah terkait pemulihan ekonomi korban pandemic Covid-19 sudah baik, dimana Pemerintah telah berupaya melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemic dengan membuat peraturan dan kebijakan serta membuat program bantuan social bagi yang terdampak Covid-19. Melalui Dinas Sosial Bantuan social banyak yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dana yang di alokasikan juga berupa dari APBN, APBA hingga APBK. Penerima bantuan social di Kabupaten Aceh Utara juga sudah hampir merata semua. Dengan adanya bantuan social maka masyarakat dapat melangsungkan hidup di masa

pandemic dan dapat beralih ke pekerjaan lain maupun membuka usaha yang dapat di lakukan pada era new normal.

- 2) Upaya yang pemerintah terhadap pemulihan ekonomi korban pandemic Covid-19 di Kabupaten Aceh Utara dipengaruhi faktor-faktor pendorong dan penghambat. Berikut faktor yang mendukung dalam upaya pemerintah terhadap pemulihan ekonomi korban bencana pandemic Covid-19:
  1. Dukungan dari Kepala Daerah
  2. Kerjasama antar lintas sektor
  3. Ketersediaan anggaran

Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :

1. Kurang lengkapnya data masyarakat tentang kondisi kehidupannya, sehingga petugas harus berulang kali mendata ulang para penerima bantuan sosial
2. Banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti tentang persyaratan untuk mendapatkan bantuan social sehingga ada KK yang terdaftar dalam beberapa program untuk bantuan social. Dan lain sebagainya.
- 3) Upaya dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara yaitu memberikan Bantuan Jaminan Sosial baik berupa sembako, hewan ternak, bahan tani, alat untuk kemajuan usaha, modal usaha maupun bantuan social tunai. Untuk penerima Bantuan Jaminan Sosial juga ada yang berkelompok, per kartu keluarga dan ada juga perseorangan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan adanya pandemi Covid-19.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa temuan penelitian belum dapat menggali secara lebih dalam perihal evaluasi upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi korban bencana pandemi Covid-19, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan evaluasi upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi korban bencana pandemi Covid-19 untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Fuad Mukhtar, S.Sos, M.S.M, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara beserta jajarannya yang telah mendukung, memberikan pandangan serta wawasan, dan memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Priyatno Utomo, 'WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi Global Halaman All - Kompas.Com', *Kompas.Com*, 2020, p. 1 <<https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkanvirus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all>>[accessed 17 September 2021].
- Daud, Anwar dkk.2020. *Penanganan coronavirus (Covid-19) ditinjau dari perspektif Kesehatan masyarakat*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, 'Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita*, 5.2 (2020), 212 <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Dinas Kesehatan Pemerintah Prov. Bali, 'Waspadai Coronavirus Covid 19; Kenali Penyebabnya Dan Lakukan Pencegahannya - Dinas Kesehatan Provinsi Bali', *Artikel Kesmas*, 2020 <<https://www.diskes.baliprov.go.id/waspadai-coronavirus-covid-19-kenali-penyebabnya-dan-lakukan-pencegahannya/>> [accessed 17 September 2021].
- Hanoatubun, S. (2020). DampakCovid – 19 terhadapPrekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Ipapedia. "Pengertian Operasional Konsep Mutik Aromsin Putri, Rusi Septyanani, and Aris Prio Agus Santoso, 'Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia', *Prosiding HUBISINTEK*, 1 (2020), 198.
- Nani Darmayanti, Memahami Definisi Operasional Dalam Penelitian Menurut para ahli dalam (Mushlimin 2013). <https://e-the-i.blogspot.com/2018/02/pengertian-operasional-secara-umum-dan.html>.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, 'PIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 -2021', 2021, 9–37 Rahmadi, Azmeri, and Safrida, 'Pengaruh Keterlibatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Terhadap Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie', *Jurnal Kebencanaan*, 3.2 (2016), 45–53 <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/article/view/13229>
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- Yamali, F.R. dan Ririn Noviyanti Putri, 'Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*,4.2 (2020), 384